



Ombudsman Republik Indonesia

Laporan Triwulan I 2010

Ombudsman Republik Indonesia

I. Pendahuluan

Periode Triwulan I 2010 ditandai dengan beberapa peningkatan akses masyarakat terhadap Ombudsman dan kegiatan terkait dengan penerimaan laporan masyarakat, upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, kerja sama dengan lembaga baik dari dalam dan luar negeri, serta penghargaan kepada Alm. KH. Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Ombudsman Republik Indonesia.

Kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia telah mengalami penataan sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dilantikannya Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, serta pembicaraan lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan tindak lanjut pembahasan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 telah membawa tahapan baru dalam pengembangan jaringan baik dalam maupun luar negeri. Pada periode Triwulan I 2010, Ombudsman Republik Indonesia mendapat kesempatan kerja sama dengan beberapa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan Kepolisian RI. Selain itu Ombudsman Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding dengan lembaga Ombudsman Korea Selatan terkait penerimaan laporan kedua belah pihak, serta studi banding dari dan ke luar negeri.

Selain kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pada tanggal 8 Pebruari 2010 lalu Ombudsman Republik Indonesia juga telah melaksanakan upacara pemberian penghargaan kepada Alm. KH. Abdurrahman Wahid sebagai Bapak Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan tersebut

dilakukan bertepatan dengan 40 hari wafatnya KH. Abdurrahman Wahid, yang menjadi tokoh penting dalam pembentukan lembaga Ombudsman di Republik Indonesia.

II. Kinerja Penanganan Laporan Masyarakat

Dalam hal penerimaan laporan, jumlah akses masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia, baik di Jakarta maupun kantor-kantor perwakilan, selama Triwulan I 2010 adalah 507. Masyarakat cenderung datang kepada Ombudsman melalui cara yang mudah dilakukan yaitu mengirim surat, baik berupa laporan, menyampaikan tembusan, maupun mengirim laporan lanjutan, yaitu sejumlah 312 surat (61,54%). Sedangkan masyarakat yang mendatangi kantor Ombudsman adalah sebanyak 108 orang/lembaga (21,30%). Masyarakat yang menyampaikan pertanyaan, tembusan, dan laporan melalui media e-mail sebanyak 35 surat, dan laporan melalui website sebanyak 26 laporan (12,03% untuk akses via e-mail dan website). Sedangkan yang menyampaikan pertanyaan atau laporan melalui telepon sebanyak 20 orang (3,94%). Dari keseluruhan jumlah akses masyarakat tersebut, 279 laporan (55,03%) dinyatakan telah memenuhi syarat formal.

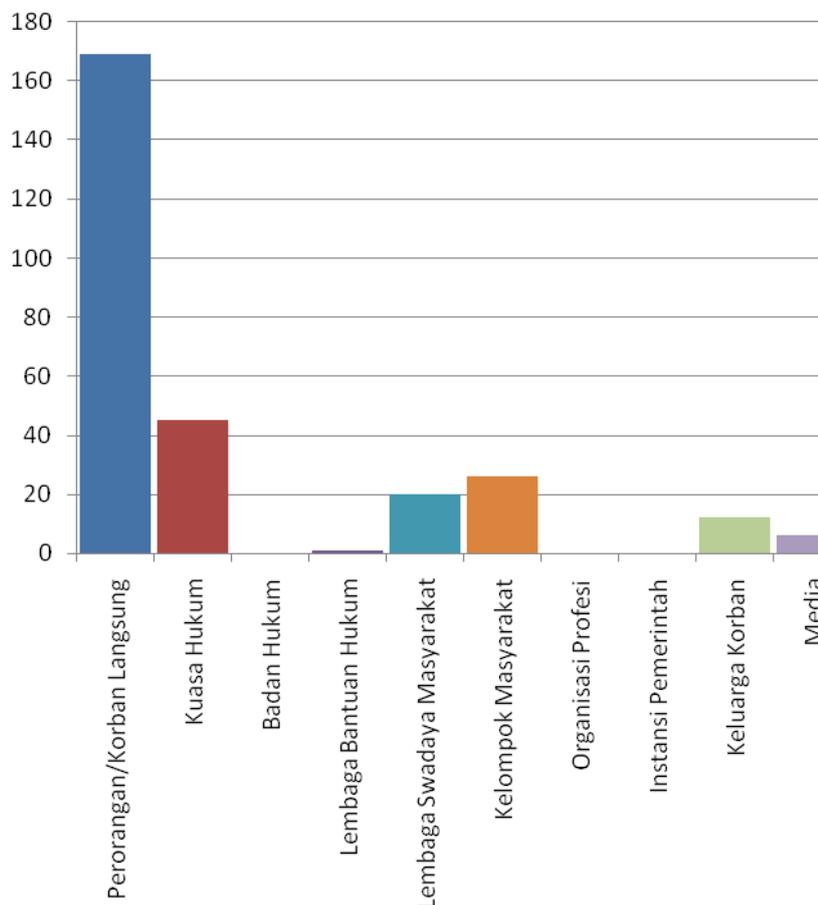
Tabel Akses Masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia

Mekanisme Akses Masyarakat	Jumlah
Surat	312
Datang Langsung	108
e-mail	35
Website	26
Telepon	20
Media	6
TOTAL	507

Data Pelapor

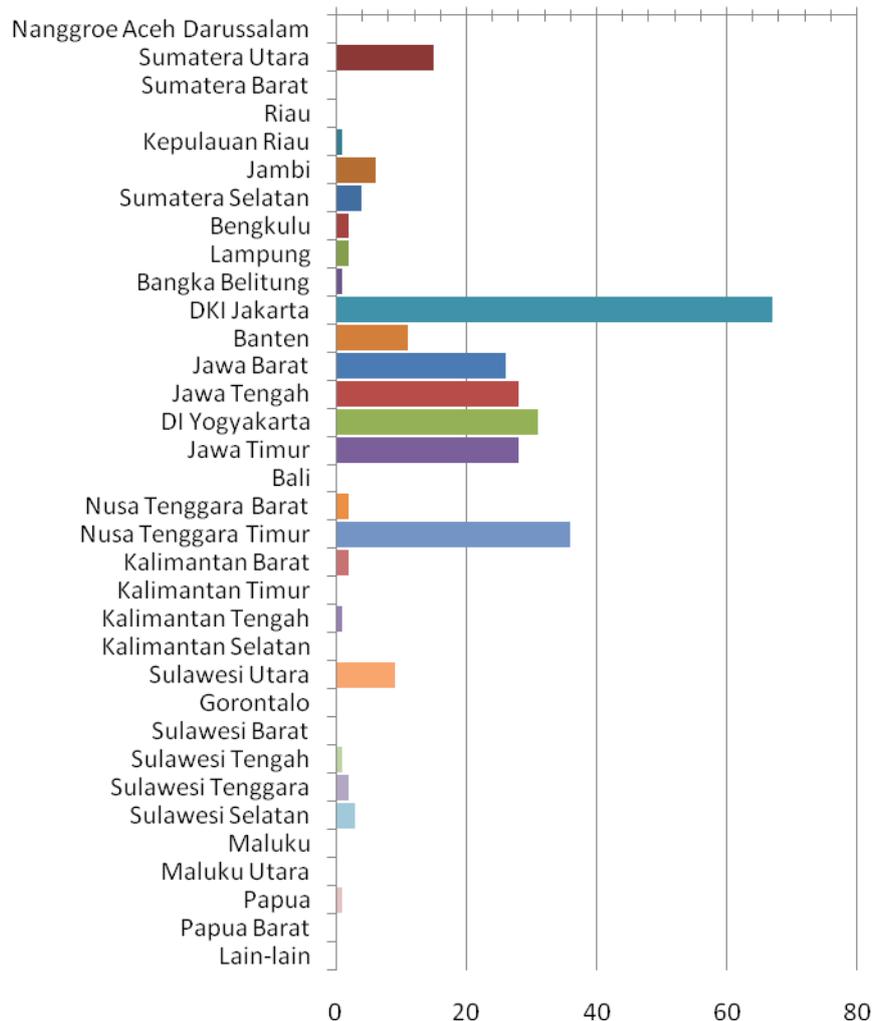
Sebagaimana periode pada tahun sebelumnya, masyarakat yang terbanyak melaporkan keluhannya tentang pelayanan publik kepada Ombudsman adalah Perorangan/Korban Langsung sebanyak 169 laporan (60,57%). Diikuti oleh Kuasa Hukum 45 laporan (16,13%), Kelompok Masyarakat 26 laporan (9,32%), Lembaga Swadaya Masyarakat 20 laporan (7,17%), dan Keluarga Korban 12 laporan (4,30%). Sedangkan laporan yang merupakan Prakarsa Ombudsman (*own-motion investigation*) adalah 6 laporan (2,15%).

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor
Januari-Maret 2010



Sama seperti periode sebelumnya, jumlah laporan terbanyak berasal dari Propinsi DKI Jakarta yaitu 67 laporan (24,01%). Diikuti oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 36 laporan (12,90%), DI Yogyakarta 31 laporan (11,11%), Jawa Timur dan Jawa Tengah masing-masing 28 laporan (10,04%), Jawa Barat 26 laporan (9,32%), dan Sumatera Utara 15 laporan (5,38%). Selain Propinsi DKI Jakarta, jumlah laporan terbanyak ternyata berasal dari lokasi dimana terdapat kantor Perwakilan Ombudsman, yaitu Yogyakarta, Kupang, Medan dan Manado. Pada tahun 2010 Ombudsman merencanakan untuk membuka 2 (dua) kantor perwakilannya di Banjarmasin dan Jayapura. Sebagaimana keberadaan kantor perwakilan sebelumnya, diharapkan Kantor Perwakilan Banjarmasin dan Jayapura nantinya dapat berperan lebih optimal dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik serta sosialisasi tentang peran dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat dan instansi pemerintah.

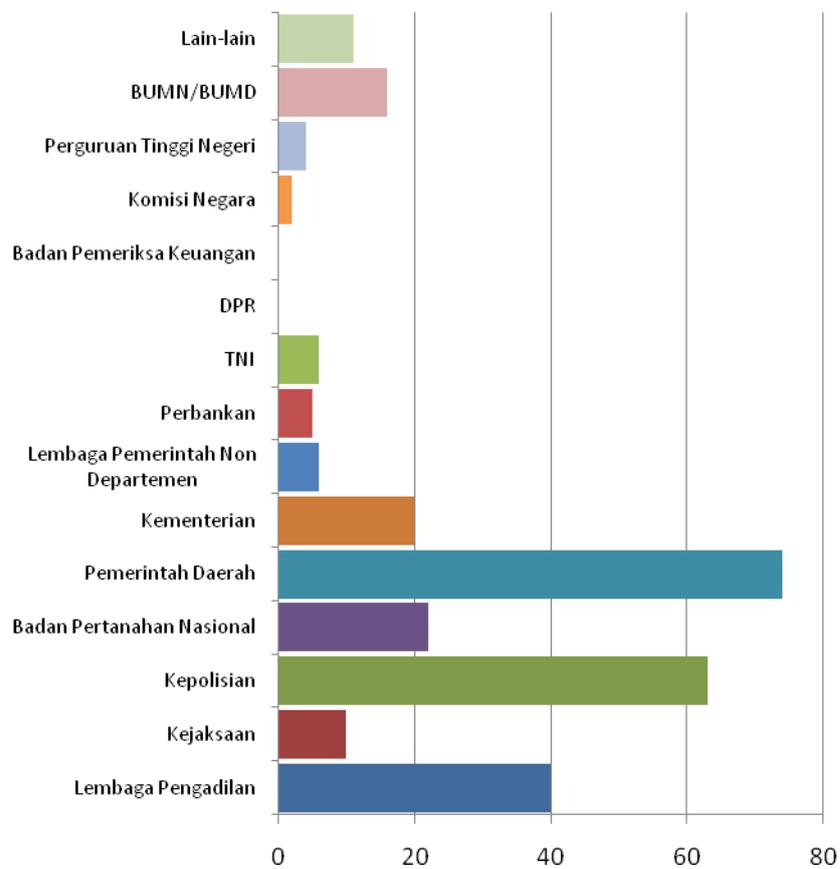
Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Asal Daerah Pelapor
Januari-Maret 2010



Data Terlapor

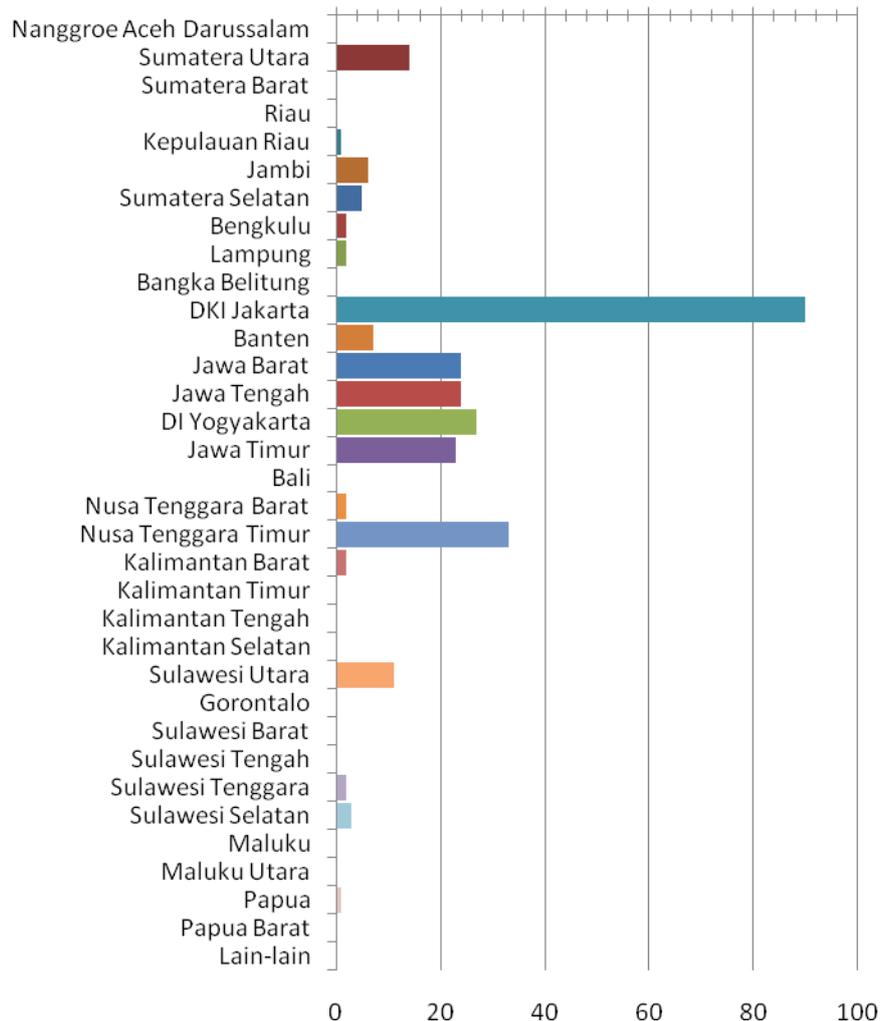
Selama periode Triwulan I 2010, instansi yang terbanyak dilaporkan kepada Ombudsman cenderung sama dengan periode sebelumnya yaitu Kepolisian dan Pemerintah Daerah. Laporan masyarakat tentang instansi Pemerintah Daerah sebanyak 74 (26,52%), sedangkan Kepolisian berjumlah 63 (22,58%). Jumlah tersebut diikuti oleh Lembaga Pengadilan sebanyak 40 laporan (14,34%), Badan Pertanahan Nasional 22 laporan (7,89%), Kementerian 20 laporan (7,17%), dan BUMN/BUMD 16 laporan (5,73%).

Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor
Januari-Maret 2010



Berdasarkan daerah instansi Terlapor, jumlah terbanyak adalah Propinsi DKI Jakarta 78 laporan (35,94%). Hal ini masih menunjukkan tingginya tingkat maladministrasi di pemerintahan pusat. Jumlah tersebut diikuti oleh Propinsi Nusa Tenggara Timur 33 laporan (15,21%), Jawa Timur 21 laporan (9,68%), Jawa Barat 20 laporan (9,22%), Sumatera Utara 12 laporan (5,53%), dan Sulawesi Utara 10 laporan (4,61%).

**Diagram Laporan Masyarakat Berdasarkan Daerah
Instansi Terlapor
Januari-Maret 2010**



Data Substansi

Berdasarkan substansi, laporan masyarakat terbanyak mengeluhkan tentang Penundaan Berlarut yaitu 147 laporan (52,69%). Sebagaimana periode sebelumnya substansi Penundaan Berlarut selalu menempati peringkat teratas dengan jumlah yang signifikan dengan substansi laporan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum puas dengan kinerja penyelenggara pelayanan publik dari segi jangka waktu pemberian layanan. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya pasal 21 menyebutkan bahwa salah satu komponen standar pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian. Standar pelayanan tersebut merupakan perangkat wajib yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian instansi pemerintah, dan Ombudsman, perlu untuk lebih mensosialisasikan mengenai implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut guna mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Substansi terbanyak berikutnya adalah Penyalahgunaan Wewenang 54 laporan (19,35%), Berpihak 26 laporan (9,32%), Penyimpangan Prosedur 21 laporan (7,53%), Tidak Kompeten 14 laporan (5,02%), serta Permintaan Uang, Barang, dan Jasa sebanyak 9 laporan (3,23%).

Tindak Lanjut Ombudsman atas Laporan Masyarakat

Hingga akhir Maret 2010 Ombudsman telah menindaklanjuti sebanyak 70,97% dari seluruh laporan masyarakat, sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 29,03%. Secara rinci, tindak lanjut berupa Permintaan Klarifikasi kepada instansi Terlapor adalah 106 (37,99%) dan Rekomendasi 6 (2,15%). Laporan yang tidak memenuhi syarat karena Bukan Wewenang Ombudsman sebanyak 12,19%. Sedangkan tindak lanjut berupa permintaan kepada Pelapor agar Melengkapi Data sebanyak 5,73%.

Tanggapan atas Tindak Lanjut Ombudsman

Sehubungan dengan laporan masyarakat yang diterima pada periode Triwulan I 2010, tindak lanjut Ombudsman (Permintaan Klarifikasi dan Rekomendasi) yang telah ditanggapi oleh instansi Terlapor adalah 63 surat (56,25%), dengan rincian 5 surat (7,94%) Menindaklanjuti Laporan, dan 58 surat (92,06%) berupa Penjelasan, termasuk didalamnya penyelesaian atas laporan masyarakat.

III. Pengawasan dan Pencegahan

Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman juga melakukan tugas pengawasan dan pencegahan. Pengawasan (monitoring) bertujuan untuk memastikan bahwa instansi Terlapor menanggapi tindak lanjut Ombudsman atas laporan masyarakat sesuai kewenangannya, baik berupa permintaan Klarifikasi maupun Rekomendasi. Selama periode Triwulan I 2010, pengawasan dan pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Ombudsman adalah sebagai berikut:

Investigasi

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Keterangan
1.	6 Januari 2010	Investigasi dugaan maladministrasi pemasangan kabel optik oleh PLN di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta	Druwo, Banguntapan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta	Warga minta agar PLN lebih transparan dalam menerapkan Corporate Social Responsibility kepada warga yang terkena dampak pemasangan kabel optik
2.	21 Januari 2010	Investigasi pembatalan putusan Pengadilan Agama	Pengadilan Tinggi Agama DI Yogyakarta	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk melaksanakan eksekusi perkara dimaksud
3.	2 Pebruari 2010	Investigasi pembayaran kompensasi dan ganti rugi jaringan kabel SUTT di Bantul, Yogyakarta	Sitimulyo, Piyungan, Kab. Bantul, DI Yogyakarta	Pelapor benar menolak pembayaran karena nilai yang diberikan PLN jauh dari NJOP pada saat itu. Ganti rugi tanaman dan bangunan

Laporan Triwulan I 2010 – Ombudsman Republik Indonesia

				juga belum diberikan oleh PLN.
4.	17 Februari 2010	Investigasi inisiatif pelayanan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan	Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di DKI Jakarta, serta Mahkamah Agung RI	Telah dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Mahkamah Agung RI untuk membahas Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis.
5.	19 Februari 2010	Investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Inspektorat Kabupaten Bantul	Kantor Inspektorat Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta	Terlapor mengakui salah secara psikologis karena meminjamkan tempat di kantornya untuk keperluan entri data KTP salah satu calon Bupati Bantul yang masih memiliki hubungan kerabat. Alasan dipinjamkannya tempat tersebut karena dilakukan di luar jam kantor dan biasa digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan.
6.	22 Februari 2010	Investigasi pembangunan Pasar Bojong Indah	Kantor Walikota Jakarta Barat	Pihak Walikota Jakarta Barat akan meminta klarifikasi terhadap pejabat terkait dan mengirimkan jawaban kepada Ombudsman dalam waktu dekat
7.	22 Februari 2010	Investigasi dugaan pembangunan kantor Sekretariat RW tanpa ijin	Kantor Walikota Jakarta Barat	Pihak Walikota Jakarta Barat akan meminta klarifikasi terhadap pejabat terkait dan mengirimkan jawaban kepada Ombudsman dalam waktu dekat terkait mekanisme pembangunan gedung Sekretariat RW 02 Kelapa Dua Kebon Jeruk di atas lahan milik Departemen Keuangan. Wakil Walikota Jakarta Barat akan bertindak sebagai <i>liaison officer</i> dalam rangka pembahasan laporan masyarakat.
8.	22 Februari 2010	Investigasi kasus pegawai honorer di Kabupaten Serang, Banten	Kantor Bupati Serang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Banten	Badan Kepegawaian Daerah Serang memberi keterangan akan menyusun Rancangan Peraturan mengenai pegawai honorer, dan akan memberikan keterangan resmi melalui surat kepada Ombudsman RI.
9.	22-25 Februari 2010	Investigasi kasus ijazah palsu anggota DPRD Kabupaten Belu, NTT.	Kabupaten Belu, NTT.	Berdasarkan hasil investigasi diduga kuat anggota DPRD tersebut memenuhi unsur pidana. Merekomendasikan kepada Kapolda NTT dan Kapolres Belu ada agar dapat

				membuka kembali penyidikan kasus ijasah palsu Anggota DPRD Belu
10.	Maret 2010	Investigasi dugaan pemilikan lahan transmigrasi tanpa hak seluas 1,5 ha.	Kantor Ombudsman RI, Jakarta	Ombudsman telah mengirimkan surat permintaan data pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan telah ditanggapi tanggal 22 Maret 2010. Akan dilakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta Pemerintah Kota Samarinda pada Triwulan II 2010.
11.	3 Maret 2010	Investigasi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait penggunaan tanah Pelapor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedang mengajukan pencabutan permohonan perubahan kuasa atau pihak ahli waris, serta mengusahakan musyawarah antara ahli waris dengan BPN dan Pemda DKI Jakarta.
12.	3 Maret 2010	Investigasi dugaan penyimpangan prosedur penangkapan tersangka narkoba	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyampaikan tidak dapat memberikan klarifikasi karena hakim yang menangani telah dimutasi ke Palembang (dalam pemeriksaan oleh Komisi Yudisial).
13.	3-4 Maret 2010	Investigasi belum adanya eksekusi atas keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kantor Pertanahan Tulungagung	Kantor Pertanahan Tulungagung, Surabaya	Saat ini terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan SHM atas nama Pelapor. Putusan TUN mendasarkan pertimbangan hukum pada perkara perdata yang akhirnya diputuskan tidak dapat diterima. Pelapor belum pernah menyampaikan putusan TUN yang membatalkan sertifikat tanah miliknya kepada Ombudsman RI.
14.	8 Maret 2010	Investigasi rehabilitasi kepegawaian terkait tahanan politik dan pensiun	Badan Kepegawaian Negara	Telah didapat keterangan dari Wakil Badan Kepegawaian Negara bahwa untuk mengupayakan rehabilitas diperlukan kebijakan dari BKN dan DPR RI. Ombudsman telah menindaklanjuti dengan mengirim surat kepada

Laporan Triwulan I 2010 – Ombudsman Republik Indonesia

				Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
15.	8-12 Maret 2010	Investigasi dugaan pemerasan dan tidak melakukan pelayanan oleh oknum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin	Ombudsman akan memberikan saran kepada Kapolda Kalimantan Selatan terkait temuan tentang prosedur penetapan Daftar Pencarian Orang yang tidak patut, yaitu 3 hari sebanyak 2 kali pemanggilan, serta penyitaan 25 unit printer sebagai bukti melebihi jumlah semestinya yaitu 24 unit.
16.	8-12 Maret 2010	Investigasi dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah	Kantor Dinas Pendidikan dan kantor Walikota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Kepala Sekolah dimaksud telah dimutasi ke sekolah biasa dengan jabatan sebagai guru biasa. Terkait dugaan penyimpangan dana BOS, Dinas Pendidikan Kota akan melakukan pemeriksaan dan mengirimkan hasilnya kepada Ombudsman RI.
17.	10 Maret 2010	Investigasi pemblokiran SHM oleh Kantor Pertanahan Yogyakarta	Kantor Pertanahan Yogyakarta	Menurut Kantor Pertanahan, secara hukum administrasi sertifikat tanah milik Pelapor belum mati. BPN akan memanggil Pelapor dan pihak Ditjen Pajak untuk memeriksa alat bukti.
18.	11 Maret 2010	Investigasi dugaan maladministrasi penerbitan SP3 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	Pelapor akan dipanggil ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan terkait keberatan atas SP3 tersebut. Ditemukan adanya inkonsistensi dalam menyampaikan alasan penghentian penyidikan, antara lain adanya vonis 1 tahun di Pengadilan Negeri Banjarmasin padahal Pelapor telah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung RI.
19.	18 Maret 2010	Investigasi dugaan maladministrasi kepegawaian	Kantor Regional BKN Yogyakarta	Dijelaskan bahwa mutasi Pelapor dikarenakan tindakan indiscipliner. Kepala BKD telah mengirim surat kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terkait permohonan Pelapor tetapi belum mendapat jawaban.
20.	19 Maret 2010	Investigasi dugaan pemilikan lahan secara sepihak oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta	Dijelaskan bahwa dasar hukum penguasaan tanah oleh Kanwil Ditjen Pajak adalah Putusan Pengadilan

				Negeri No. 169/Pdt/G/1994/PN.yk. Pihak Kanwil BPN pernah memfasilitasi dengan membentuk tim penyelesaian. Rencana ini akan dilanjutkan kembali.
21.	29-31 Maret 2010	Investigasi dugaan maladministrasi pembangunan pasar Sukolilo	Kantor Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah	Pembangunan Pasar Sukolilo tidak menggunakan APBD, sehingga tidak dilakukan lelang, melainkan tawaran dari seseorang yang kemudian minta kompensasi berupa pembelian kios oleh pedagang. Pembangunan tetap dilaksanakan meski terjadi pro dan kontra.
22.	30 Maret 2010	Investigasi dugaan tidak melakukan pelayanan oleh Kepolisian Sektor Lahusa, Nias Selatan, Sumatera Utara.	Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Sektor Lahusa	Ombudsman akan menyampaikan temuan di lapangan sebagai bahan pertimbangan Polda dalam menindaklanjuti kasus dimaksud. Pihak Polres Nias Selatan menerangkan sampai saat ini kasus tersebut masih dilakukan penyidikan serta pengumpulan keterangan dari saksi dan pihak terkait.
23.	31 Maret 2010	Investigasi dugaan maladministrasi proses seleksi CPNS di Nias Selatan	Kantor Badan Kepegawaian Daerah Nias Selatan	Kepala BKD mengakui terjadi kelalaian terhadap pengangkatan CPNS formasi tahun 2008 yang menyebabkan keterlambatan, serta berjanji akan memprioritaskan pengangkatan CPNS formasi tahun 2008.

Monitoring

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Keterangan
1.	26 Januari 2010	Rapat Koordinasi tindak lanjut penanganan kasus perusakan kantor Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta	Kantor Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	Ada perbedaan pendapat antara pihak penyidik Poltabes Yogyakarta dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai ijin pemeriksaan Bupati Bantul oleh Presiden. Namun kedua pihak sepakat bahwa syarat formil dan materil sudah lengkap.
2.	4 Februari 2010	Monitoring laporan permohonan ijin cerai PNS	Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta	Dekan FIP akan mengirim surat kepada Rektor UNY berkenaan dengan permohonan izin cerai yang diajukan, mengingat

Laporan Triwulan I 2010 – Ombudsman Republik Indonesia

				pemberian/penolakan izin cerai merupakan kewenangan Rektor UNY
3.	12-13 Pebruari 2010	Monitoring kasus kepegawaian di SMPN 2 Fatuleu, Kupang, NTT.	SMPN 2 Fatuleu, Kupang, NTT	Telah didapat keterangan dan sudah menyurati Kepala Dinas PPO Kab. Kupang agar memantau pengurusan DP3 Pelapor
4.	16 Pebruari 2010	Monitoring laporan masyarakat kepada Badan Pertanahan Nasional	Kantor Badan Pertanahan Nasional	Ombudsman meminta agar pihak Badan Pertanahan Nasional menanggapi seluruh laporan masyarakat yang disampaikan melalui Ombudsman. BPN akan menindaklanjuti surat-surat Ombudsman dalam waktu 2 (dua) hari sejak pertemuan tersebut.
5.	17 Pebruari 2010	Monitoring layanan SAMSAT /Dispenda Prov. NTT	Kantor SAMSAT/ Dispenda Prov. NTT di Kupang, NTT.	Kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT dan NTB akan melakukan survei indeks kepuasan masyarakat mengenai layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kupang
6.	18 Pebruari 2010	Monitoring layanan imigrasi di kantor pelayanan Imigrasi Kupang	Kantor Imigrasi Kupang, NTT	Kantor Imigrasi Kupang diharapkan dapat meningkatkan layanannya dan mensosialisasikan melalui media massa
7.	22 Pebruari 2010	Monitoring dugaan pengalihan sertifikat tanpa hak oleh PT Garam	PT Garam, Surabaya	Direktur Utama PT Garam menyatakan bersedia memenuhi Rekomendasi Ombudsman, namun terkendala komunikasi dengan Pelapor yang memiliki semua data dan dokumen. Ombudsman RI akan membantu kelancaran koordinasi dengan Pelapor agar Rekomendasi dapat dilaksanakan.
8.	22 Pebruari 2010	Monitoring laporan pembatalan beasiswa di Universitas Islam Negeri Yogyakarta	Fakultas Tarbiyah UIN Yogyakarta	Dijelaskan mengenai pembatalan beasiswa karena yang bersangkutan belum melunasi biaya pendidikan sebagai persyaratan seluruh mahasiswa UIN Yogyakarta. Mahasiswa yang bersangkutan saat ini sudah direkomendasikan untuk diberi kesempatan cuti.
9.	3-4 Maret 2010	Monitoring dugaan maladministrasi atas pemberhentian pegawai	Kantor Pemerintah Kota Surabaya	Ketentuan hasil evaluasi menyatakan Pelapor memenuhi nilai kelulusan

		honorer Pemerintah Kota Surabaya		dalam lampiran form penilaian dengan nilai rata-rata baik. Hal ini bertentangan dengan keterangan Kepala Kepegawaian Kota Surabaya bahwa yang bersangkutan sering bertindak sebagai calo pengurusan izin bangunan dan izin lain terkait pengurusan di Dinas Tata Kota Surabaya.
10.	3 Maret 2010	Monitoring layanan Rumah Sakit Daerah W.Z. Yohanes, Kupang, NTT	RSUD W.Z. Yohanes, Kupang, NTT	Akan dilakukan pertemuan kembali dengan pihak RSUD Kupang guna membicarakan tentang kondisi-kondisi yang ditemukan berdasarkan hasil pemantauan tim Ombudsman
11.	4-6 Maret 2010	Monitoring dugaan maladministrasi penanganan pembunuhan oleh penyidik Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, NTT	Kepolisian Resort Timor Tengah Utara, NTT	Kepolisian Resort TTU akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang masih dalam pencarian serta saksi-saksi lainnya, dan berharap agar pihak keluarga korban dapat bekerja sama lebih lanjut
12.	23 Maret 2010	Monitoring Kantor Pelayanan Perijinan dan aparat penegak hukum di Kab. Banyumas	Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Banyumas	Pelayanan perijinan sudah dilakukan satu pintu (<i>one stop service</i>), dan dilakukan secara transparan. Disarankan agar menyediakan petugas <i>frontline</i> yang menerima permohonan dan pengaduan masyarakat.
13.	25 Maret 2010	Monitoring Kantor Pelayanan Perijinan di Kab. Purworejo	Kantor Pelayanan Perijinan Kab. Purworejo	Pelayanan perijinan sudah dilakukan satu pintu (<i>one stop service</i>), dan dilakukan secara transparan. Sudah ada petugas <i>frontline</i> yang menerima permohonan dan pengaduan masyarakat.
14.	29-31 Maret 2010	Monitoring pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya oleh Bupati Timor Tengah Selatan, NTT	Kantor Bupati Timor Tengah Selatan, NTT	(masih dalam pelaksanaan)

Mediasi

No.	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Keterangan
1.	20 Januari 2010	Mediasi tuntutan kompensasi pemasangan kabel optik oleh PT. PLN dan PT. ICON+ dengan warga Druwo, Banguntapan,	Kantor Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	PT. ICON+ meminta maaf dan menjelaskan perihal pemasangan kabel tanpa ijin warga dan berjanji

		Bantul		memberikan tali asih difasilitasi oleh Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
2.	2 Pebruari 2010	Mediasi kasus ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya	Kantor Ombudsman RI, Jakarta	Telah disepakati mekanisme pembayaran ganti rugi oleh PT. Jasa Marga dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi
3.	9 Pebruari 2010	Mediasi pemberian kompensasi dan ganti rugi proyek jalur SUTT 150 Kv Bantul-Semanu antara PT.PLN (Persero) Prokitring dengan warga Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Kantor Ombudsman RI Perwakilan DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	Belum ada kesepakatan, namun kedua belah pihak akan berkomunikasi agar dapat segera menyelesaikan pembayaran. Jika sudah ada kesepakatan, pihak PLN akan melakukan penelitian di lapangan dan membayar langsung warga yang belum menerima kompensasi dan ganti rugi.
4.	31 Maret 2010	Mediasi kasus pembangunan dan penataan Pasar Sukolilo Pati antara Paguyuban Pedagang Pasar Sukolilo dengan Pemerintah Daerah Kab.Pati	Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah	Belum ada kesepakatan antara kedua pihak meskipun sudah ada penjelasan tentang status lahan dari pihak Setda Pati. Dimungkinkan ada pertemuan lanjutan difasilitasi oleh Ombudsman Perwakilan Wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

IV. Catatan Khusus Kinerja Badan Pertanahan Nasional

Pada Triwulan I Tahun 2010 Ombudsman memiliki catatan penting terkait kinerja penyelenggara pelayanan publik khususnya Badan Pertanahan Nasional. Sebagai penyelenggara pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dengan demikian BPN memiliki posisi yang sangat strategis salah satunya dalam bidang administrasi pertanahan. Berdasarkan statistik laporan di Ombudsman, selama ini posisi BPN berada dalam 4 besar instansi yang paling sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan yang sangat menonjol adalah mengenai kinerja BPN dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap. Setidaknya-tidaknya dalam dua tahun terakhir Ombudsman telah menerima lebih dari 15 keluhan mengenai hal tersebut. Dalam kasus-kasus tersebut Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota bahkan Kantor Wilayah BPN di tingkat Propinsi sudah memberikan saran/pendapat kepada BPN untuk melaksanakan putusan dimaksud baik berupa pembatalan atau penerbitan sertifikat baru. Namun demikian BPN tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 16 Februari 2010, Tim Ombudsman melakukan monitoring, bertemu dengan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan untuk memastikan tindak lanjut penyelesaian keluhan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak BPN menjelaskan bahwa terhadap permasalahan yang ditanyakan Ombudsman BPN telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikannya namun untuk penjelasan detailnya akan disampaikan dalam waktu dekat karena masih mengumpulkan data yang berada di kedeputian lain.

Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tersebut, sebelumnya Ombudsman telah menyampaikan beberapa surat kepada Badan Pertanahan Nasional. Bahkan pada tahun 2008 Wakil Ketua didampingi beberapa Anggota Ombudsman bertemu langsung dengan Kepala BPN, Dr. Joyo Winoto beserta jajaran guna meminta penjelasan langsung mengenai permasalahan di atas. Pada kesempatan itu pihak BPN menyampaikan akan segera melakukan penelitian dan memberikan penjelasan secara rinci mengenai upaya yang telah dilakukan BPN dalam menyelesaikan keluhan masyarakat dimaksud. Melalui surat Nomor: 1094-630.1-DV tertanggal 20 April 2009 tentang Penjelasan Resume Kasus-kasus Sengketa Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional RI, Deputi Bidang pengkajian Dan Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan menyampaikan antara lain bahwa kasus-kasus pertanahan sebagaimana disebutkan dalam surat-surat Ombudsman RI belum menjadi target operasi tahun 2008, untuk itu direncanakan menjadi target operasi penyelesaian tahun 2009.

Namun hingga saat ini BPN belum memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dijanjikan sebelumnya, meskipun demikian Ombudsman berusaha mengingatkan BPN untuk menyampaikan surat tersebut.

Ombudsman memberikan perhatian sungguh-sungguh atas permasalahan di atas mengingat upaya yang telah ditempuh masyarakat untuk memperoleh haknya melalui pengadilan sudah sangat memakan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Beberapa putusan pengadilan telah berkekuatan tetap sejak lebih kurang 5 tahun bahkan ada yang telah lebih dari 13 tahun yang lalu. Namun putusan pengadilan tersebut seolah-olah tidak diperhatikan BPN, dengan demikian tujuan untuk memperoleh keadilan tidak pernah terwujud yang diperoleh justru ketidakadilan oleh BPN dengan tidak segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu Ombudsman sesuai wewenang terus berupaya agar BPN segera memberikan penjelasan mengenai kepastian penyelesaian permasalahan di atas.

V. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Dalam rangka pelaksanaan mandat sesuai Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, telah dilakukan pertemuan antara Anggota Ombudsman Republik Indonesia dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya pada tanggal 13 Januari 2010. Agenda pembicaraan terfokus pada tindak lanjut pembahasan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Di sisi lain, sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya mengenai struktur kelembagaan yang mensyaratkan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, maka pada tanggal 21 Januari 2010, Ketua Ombudsman Republik Indonesia telah melantik Dr. Suhariyono AR sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang pertama. Dr. Suhariyono AR sebelumnya bertugas sebagai Direktur Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM, dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 7/M Tahun 2010. Tugas utama Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana disampaikan dalam sambutan Ketua Ombudsman Republik Indonesia adalah persiapan anggaran dan pengelolaan anggaran secara otonom, pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di Daerah, dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian (*assessment*) di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo pada tanggal 2-5 Maret 2010 dan Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah NTT dan NTB pada tanggal 9-12 Maret 2010. Sebelumnya pada tanggal 22-23 Pebruari 2010 telah dilaksanakan pula *assessment* kesekretariatan dan penanganan keluhan di Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka optimalisasi peran Ombudsman juga dilakukan, khususnya oleh kantor perwakilan Ombudsman RI, diantaranya Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pelatihan para legal yang diselenggarakan PADMA Indonesia di Kupang pada tanggal 13 Februari 2010, dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada Diklat Pra Jabatan Golongan III Gelombang I Provinsi NTT di Kupang pada tanggal 9 Maret 2010.

VI. Pengembangan Jaringan

Setelah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 17 Desember 2009 lalu terkait pelayanan di lembaga pemasyarakatan, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima kunjungan kerja sama dengan beberapa lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, serta Kepolisian RI. Untuk itu Ombudsman Republik Indonesia tengah membicarakan lebih lanjut bentuk kerja sama dengan beberapa lembaga tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan Ombudsman.

Di sisi lain Ombudsman telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan lembaga Ombudsman Korea Selatan pada tanggal 1 Pebruari 2010 lalu. Kerja sama yang dilakukan terkait dengan perlindungan hak-hak warga negara yang tinggal baik di Indonesia maupun Korea Selatan, khususnya hak mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Ombudsman Republik Indonesia juga telah menerima kedatangan beberapa lembaga dari luar negeri dalam rangka studi banding. Tanggal 18 Maret 2010 Ombudsman kedatangan delegasi Review Committee of the Intelligence and Security Services (CTIVD) dari Belanda, dan lembaga Taipei Economic and Trade Office (Control Yuan) pada tanggal 22 Maret 2010 di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Secara umum pembicaraan berkisar tentang tukar menukar informasi tentang kelembagaan masing-masing lembaga.

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti kerja sama internasional yang telah dibina Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan keterlibatannya di Asian Ombudsman Association, maka telah dilaksanakan pengiriman staf Ombudsman untuk mengikuti pelatihan dalam proyek yang didanai oleh Asian Development Bank. Pelatihan tersebut meliputi materi Advance Investigation for Senior Assistant di Jepang pada tanggal 25-30 Januari 2010, dan diikuti oleh Asisten Ombudsman, Nugroho Andriyanto, SH. Pelatihan lain yang diikuti meliputi materi Investigation Skill di Thailand pada tanggal 8-11 Pebruari 2010 dan diikuti oleh Asisten Ombudsman, Ibnu Firdaus Zayyad, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah NTT dan NTB, Dr. Yohanes GT Helan, SH. Terakhir, pelatihan mengenai General Complaint Handling di Korea Selatan pada tanggal 15-26 Maret 2010 diikuti oleh Asisten Ombudsman, Sabarudin Hulu, SH.

Pada bagian lain, baik kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta maupun kantor perwakilan Ombudsman Republik Indonesia juga melaksanakan peran pengembangan jaringan melalui keterlibatan dalam beberapa kegiatan dengar pendapat, diskusi, dan seminar yang diselenggarakan lembaga lain, termasuk menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut. Antara lain dalam kegiatan dengar pendapat terkait layanan kesehatan di UGM Yogyakarta pada tanggal 22 Pebruari 2010, diskusi perlindungan konsumen, diskusi Raperda Pelayanan Publik DI Yogyakarta, diskusi permasalahan kehutanan di wilayah NTT, diskusi implementasi UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagainya.

VII. Laporan Keuangan

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
JANUARI S.D MARET
TA. 2010**

KODE	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA PAGU	REALIASI DALAM PERSEN (%)
	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	16.000.000.000	617.614.065	15.382.385.935	3,86%
0001	PENGELOLAAN GAJI, HONORARIUM DAN TUNJANGAN	5.115.600.000	351.700.000	4.763.900.000	6,88%
0001	PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI	5.115.600.000	351.700.000	4.763.900.000	6,88%
0002	PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	5.114.017.000	82.545.565	5.005.071.435	1,61%
00032	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI	26.400.000		26.400.000	0,00%

00034	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/ PESURUH/ PERAWAT/DOKTER/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA	5.950.000		5.950.000	0,00%
00205	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	374.325.000		374.325.000	0,00%
00256	PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	248.977.000		248.977.000	0,00%
00926	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	505.693.000		505.693.000	0,00%
01138	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10	32.700.000		32.700.000	0,00%
02003	SEWA GEDUNG KANTOR/PERALATAN/KENDARAAN	1.237.782.000		1.237.782.000	0,00%
02005	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	11.200.000		11.200.000	0,00%
02007	LANGGANAN DAYA DAN JASA	1.200.840.000	30.493.164	1.170.346.836	2,54%
04863	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	1.470.150.000	52.052.401	1.418.097.599	3,54%
0003	PELAYANAN PUBLIK ATAU BIROKRASI	5.070.383.000	183.368.500	4.799.724.500	26,19%
00003	PEMBUATAN BUKU LITERATUR	59.125.000		59.125.000	0,00%
00005	PEMBUATAN LEAFLET/POSTER	102.600.000		102.600.000	0,00%
00012	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS	803.700.000		803.700.000	0,00%
00035	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	335.278.000		335.278.000	0,00%
00051	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/ PROGRAM	77.750.000		77.750.000	0,00%
00056	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN	30.600.000		30.600.000	0,00%
00065	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI	724.900.000		724.900.000	0,00%
00070	BANTUAN DELEGASI RI KE SIDANG INTERNASIONAL	192.000.000		192.000.000	0,00%
00082	DENGAR PENDAPAT DENGAN ORGANISASI/ LEMBAGA/TOKOH MASYARAKAT	96.200.000		96.200.000	0,00%
00088	RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/ PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI	497.892.000	115.500.000	382.392.000	23,20%
00096	IURAN ORGANISASI LOKAL/INTERNASIONAL	22.000.000		22.000.000	0,00%
00657	PEMANTAUAN DAN EVALUASI	1.977.514.000	59.158.500	1.918.355.500	2,99%
01176	PENYUSUNAN RKA-KL, SRAA DAN DIPA	54.824.000		54.824.000	0,00%
01176	PEMBINAAN DAN KONSULTASI	96.000.000	8.710.000	87.290.000	9,07%
0024	PEMBANGUNAN/PENGGANDAAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	700.000.000	-	-	0,00%
00272	PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG	700.000.000			0,00%

VIII. Penutup

Secara ringkas Laporan Triwulan I 2010 menyimpulkan perkembangan yang dialami oleh Ombudsman Republik Indonesia ke arah yang lebih baik. Perkembangan dimaksud meliputi aspek penanganan laporan masyarakat (khususnya pengawasan dan pencegahan), kelembagaan, serta pengembangan jaringan kerja sama dalam dan luar negeri. Dalam aspek kelembagaan, Ombudsman Republik Indonesia telah mengikuti jalur pengembangan yang sesuai dengan mandat Undang-

Undang No. 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Sedangkan jaringan kerja sama yang dibangun semakin menunjukkan eksistensi Ombudsman sesuai harapan yang dibayangkan dalam fungsi dan kewenangan sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang turut berperan dalam menciptakan *good governance* dan pelindung hak-hak masyarakat.

Di sisi lain, aspek penanganan laporan masyarakat masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam hal peningkatan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang menangani laporan masyarakat. Mekanisme pengembangan dalam aspek tersebut jelas terkait dengan berbagai adanya perangkat infrastruktur dan suprastruktur yang memadai. Sesuai dengan Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia 2010-2014, pengembangan terhadap kapasitas internal kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia menjadi pokok penekanan utama guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.